EVALUASI PELAKSANAAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI KOTA BATAM

SKRIPSI

Oleh:
Tri Juniati Tan
171010046

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2021

EVALUASI PELAKSANAAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI KOTA BATAM

SKRIPSI
Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana

Oleh
Tri Juniati Tan
171010046

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2021

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama	: Tri juniati tan
NPM	: 171010046
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi	: Administrasi Negara

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat dengan judul:

"Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Batam"

Adalah hasil karya sendiri dan bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip di dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 26 Juli 2021

Tri Juniati Tan
171010046

EVALUASI PELAKSANAAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI KOTA BATAM

SKRIPSI
Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana

Oleh
Tri Juniati Tan
171010046

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal

seperti tertera di bawah ini

Batam, 31 Juli 2021

Dedi Epriadi, S.Sos., M.Si.
Pembimbing

UPB

Universitas Putera Batam

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan masalah mendasar dalam pembangunan ekonomi terlebih di Indonesia, sehingga pemerintah terus mengupayakan untuk menerbitkan program pengentasan kemiskinan salah satunya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai merupakan bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warong. Melalui penelitian ini, penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan serta program bantuan pangan non tunai di Kota Batam dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan pangan non tunai di Kota Batam.Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif guna mendapatkan data yang relevan dan valid dalam melakukan sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, penulis melibatkan 11 informan dari berbagai pihak yang terkait dengan Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Batam dan informan dipilih dengan teknik purposive sampling. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sudah melaksanakan sesuai dengan pedoman yang telah berlaku, namun perlu adanya peningkatan dibeberapa aspek seperti terkait karakteristik masalah, input, proses, serta budaya lokal dan dinamika politik lokal yang masih terdapat masalah-masalah dan mampu menghambat pelaksanaan program bantuan pangan non tunai berjalan secara optimal.

Kata kunci: Evaluasi, Bantuan Pangan Non Tunai, Dinas Sosial, Kota Batam

ABSTRACT

Poverty is a fundamental problem in economic development especially in Indonesia, so the government continues to strive to issue poverty alleviation programs, one of which is the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program which in the Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 20 of 2019 concerning the Distribution of Non-Cash Food Assistance is social assistance. which is distributed non-cash from the government which is given to KPM (Beneficiary Families) every month through electronic money which is then used to buy food ingredients that have been determined at the e-warong. Through this study, the authors aim to find out how the implementation and program of non-cash food assistance in Batam City and determine the factors that influence the implementation of non-cash food assistance in Batam City. valid in conducting a research. In this study, the authors involved 11 informants from various parties related to Non-Cash Food Assistance in Batam City and the informants were selected by purposive sampling technique. The Batam City Social and Community Empowerment Service in implementing the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) has implemented it in accordance with the applicable guidelines, but there needs to be improvements in several aspects such as the characteristics of problems, inputs, processes, as well as local culture and local political dynamics that are still ongoing. there are problems and are able to hinder the implementation of the non-cash food assistance program running optimally.

Keywords: Evaluation, Batam City , Non-Cash Food Aid, Social Service

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan proposal tentang "Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Batam".

Dalam makalah ini penulis membahas mengenai bagaimana mengidentifikasikan masalah tulisan, latar belakang, tujuan dan manfaat tulisan, menidentifikasi kerangka teori, formulasi isi tulisan dan bagaimana membuat kesimpulan dan saran dalam proposal.

Dalam menyelesaikan makalah ini, Tim Penulis telah banyak mendapat bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Tim Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Nur Elfi Husda,S.Kom.,M.Si sebagai Rektor Universitas Putera Batam.
2. Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T.,M.I.Kom sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora.
3. Padrisan Jamba, S.H.,M.H sebagai Ketua Program Studi Administrasi Negara.
4. Dedi Epriadi, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi serta Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dalam penyelesaian tugas akhir ini.
5. Seluruh Dosen Program Studi Administrasi Negara serta seluruh dosen dan staff Universitas Putera Batam.
6. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, Tenaga Kerja Sosial Kecamatan serta Pengelola E-Warong dan Agen beserta penerima Bantuan Pangan Non Tunai Kecamatan Sekupang, Bengkong dan Nongsa yang telah bersedia untuk menjadi informan dalam penelitian ini.
7. Orang Tua serta keluarga yang sudah mendukung penulis secara sepenuhnya.
8. Anju Indriani, Afrida Suryaningsih, dan Riri Nurmawaty Siregar selaku sahabat yang selalu memberikan dukungan moril dan telah meluangkan waktu untuk senantiasa membantu.

9. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah turut membantu sehingga makalah ini dapat terselesaikan dengan baik dan dalam waktu yang tepat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna, namun demikian penulis sangat berharap jika makalah ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Akhir kata Penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Batam, 26 Juli 2021

Tri JuniatiTan

UPB

Universitas Putera Batam

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS ..... **iii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
ABSTRACT ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR GAMBAR ..... **xi**
DAFTAR TABEL ..... **xii**
DAFTAR BAGAN ..... **xiii**
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Penelitian 1
1.2. Rumusan Masalah 6
1.3. Tujuan Penelitian 6
1.4. Manfaat Penelitian 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Teori Dasar 8
2.1.1 Kebijakan Publik 8
2.1.2 Pemerintahan Daerah 10
2.1.3 Koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan 12
2.1.4 Implementasi Kebijakan Publik 12
2.1.5 Penilaian Kinerja Program 14
2.1.6 Evaluasi Kebijakan 15
2.1.7 Bantuan Pangan Non Tunai 18
2.2. Penelitian Terdahulu 19
2.3. Kerangka Pemikiran 22
..... **23**
BAB III METODE PENELITIAN
3.1. Jenis Penelitian 24
3.2. Fokus Penelitian 24
3.3. Sumber Data 24
3.4. Teknik Pengumpulan Data 26
3.5. Metode Analisis Data 27
3.6. Keabsahan Data 28
3.7. Lokasi dan Jadwal Penelitian 29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Gambaran Umum 36
4.1.1. Gambaran Umum Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam 36
4.1.2. Kondisi Umum Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Batam 45
4.2. Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Batam 49
4.2.1. Tahap Penentuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 49

4.2.2. Tahap penentuan pembentukan dan pengelola E-Warong atau Agen Penyaluran BPNT 53
4.2.3. Tahapan Pengawasan Penyaluran BPNT 56
4.2.4. Tahap Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai 58
4.3. Pembahasan 60
4.3.1. Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Batam 60
4.3.2. Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Batam 61
4.3.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Batam 63
BAB V SIMPULAN DAN SARAN
5.1. Simpulan 66
5.2. Saran 67
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
Lampiran 1 Pendukung Penelitian
Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3.1 Kerangka Pemikiran 23
Gambar 3.4.1 Komponen dalam analisis data 27
Gambar 4.1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam..... 37

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1 Indikator Evaluasi Kebijakan 18
Tabel 3.3.1 Nama Narasumber Penelitian 25
Tabel 4.1.1 Jumlah Penduduk miskin Di Kota Batam Per-Maret 2020 45
Tabel 4.1.2 Jumlah Penerima BPNT Per-Kecamatan Kota Batam Oktober 2020.. 46

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1.1 Kedekatan Prosedur Analisis Kebijakan dengan Tipe-tipe Pembuatan Kebijakan 9
Bagan 2.1.2 Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sabatier..... 13
Bagan 4.1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam..... 37

UPB

Universitas Putera Batam

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki 16.000 pulau dan jumlah penduduk 268.074.600 jiwa pada tahun 2019 dan menempati peringkat keempat dunia sebagai negara terpadat (Badan Pusat Statistik Nasional, 2020, hal. 89). Karena begitu luas dan banyaknya penduduk di Indonesia, tidak dapat dipungkiri jika tidak seluruh masyarakat Indonesia dapat dijangkau oleh pemerintah secara sepenuhnya. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa kita masih mudah menemukan penduduk yang kondisi ekonominya rendah dikarenakan kurang adanya pemerataan.

Kemiskinan merupakan suatu masalah yang selalu menjadi perhatian utama pemerintah di dunia terutama untuk negara berkembang layaknya Indonesia, karena kemiskinan merupakan permasalahan mendasar dalam pembangunan ekonomi. Permasalahan ini ditunjukkan dari data yang diterbitkan oleh BPS Nasional, yang mengatakan jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 26.424.020 jiwa per-semester pertama tahun 2020. Jumlah kemiskinan di Indonesia meningkat jika dibandingkan dengan jumlah kemiskinan di tahun 2019 yang berjumlah 24.785.870 jiwa per-semester dua tahun 2019 (Badan Pusat Statistik, 2019). Hal ini terjadi karena meningkatnya angka pengangguran yang juga diakibatkan oleh terjadinya pandemi atau merebaknya virus korona di Indonesia bahkan dunia. Karena terjadinya pandemi korona ini tentu berdampak dalam penambahan jumlah pengangguran di Indonesia, pada bulan juli jumlah pengangguran di Indonesia bertambah 3.7 Juta Orang (CNBC Indonesia, 2020).

Berbanding lurus dengan masalah kemiskinan di Indonesia, masalah yang serupa juga terjadi di provinsi Kepulauan Riau, dalam Maret 2019 tercatat jika jumlah penduduk miskin di provinsi ini sebanyak 128.460 jiwa, dan Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau mencatat jika periode Maret 2014 hingga Maret 2020

tingkat kemiskinan Kepri mengalami naik-turun, baik dari sisi jumlah penduduknya ataupun persentasenya. Pada Maret 2020 tercatat 131.966 orang (5,92%) yang memiliki catatan pengeluaran rendah dalam jangka waktu per-bulan, angka ini meningkat sebesar 4.208 penduduk dibandingkan bulan September 2019 dengan jumlah 127.758 penduduk (Barakata, 2020).

Sejalan dengan keadaan Kepulauan Riau, Kota Batam merupakan kota yang cukup berkembang pesat di Kepulauan Riau hal ini dikarenakan Kota Batam memiliki letak geografis dan menjadikan Kota Batam sebagai kawasan khusus perdagangan bebas sehingga Batam di dominasi dengan perindustrian. Namun, di tengah-tengah kota yang berkembang seperti ini masih dapat ditemukan banyaknya masyarakat yang tidak merasakan perkembangan tersebut, sehingga memiliki perekonomian yang buruk ataupun rendah (Batamnews, 2020) masalah ini juga banyak ditemukan di Kota Batam mengingat Kota Batam merupakan penyumbang tertinggi untuk jumlah penduduk miskin di Kepulauan Riau yaitu dengan jumlah 67.06 ribu jiwa. Ada banyak faktor yang menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan di Kota Batam dan salah satu faktor dari kemiskinan di Kota Batam tentunya karena banyaknya pengangguran, dimana tidak bekerjanya masyarakat yang berada diusia kerja dikarenakan ketersediaan lapangan pekerjaan yang belum memadai, maka dari itu perlu adanya pusat kesejahteraan sosial (Puskesos) disetiap daerah karena memiliki peran yang sangat penting dimana puskesos memberikan pelayanan kepada penduduk miskin berupa melayani keluhan dan memberikan penyelesaian terhadap keluhan-keluhan seperti yang dalam penelitian yang terdahulu dengan judul Peran Pusat Kesejahteraan Sosial Dalam Pelayanan Sosial Terintegratif (Habibullah, 2020).

Masalah kemiskinan seakan tidak pernah berhenti, maka dari itu pemerintah terus mengupayakan penurunan angka kemiskinan ini melalui program-program pengentasan kemiskinan, seperti yang disampaikan dalam penelitian tedahulu dengan judul Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan di Kota Batam, banyak program pengentasan kemiskinan di Kota Batam namun program-program tersebut belum dapat mengurangi kemiskinan di Batam, faktor utamanya berada di tahap implementasinya, karena masih ditemukan banyak penerima bantuan

yang tidak memenuhi persyaratan sedangkan yang benar-benar dalam keadaan miskin tidak memperoleh bantuan tersebut (Putra & Abbas, 2019).

Masalah kemiskinan ini merupakan permasalahan yang sangat serius, kemiskinan menjadi bukti jika Indonesia belum dapat mencapai tujuan negara ini sesuai yang dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945. Sehingga pemerintah harus lebih serius lagi dalam upaya pengentasan kemiskinan, ada banyak cara untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, salah satunya seperti yang dinyatakan dalam penelitian terdahulu yang berjudul Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendekatan Kewirausahaan Sosial yang mengatakan jika membentuk masyarakat menjadi seorang wirausaha sebagai upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, karena kewirausahaan sosial merupakan salah satu cara penunjang perekonomian masyarakat sehingga dapat membuat perekonomian dan penghasilan masyarakat menjadi lebih tinggi (Firdaus, 2014).

Karena begitu seriusnya permasalahan kemiskinan ini, pemerintah terus menerbitkan program-program baru guna memperbaiki program-program sebelumnya, sebagai upaya dalam menurunkan jumlah penduduk miskin, maka pemerintah Indonesia menerbitkan program bantuan pangan non tunai. Program ini resmi berjalan pada tahun 2017 sebagai perubahan dari Program Beras Sejahtera (Rastra) yang berakhir di bulan Mei 2019. Pada tahun pertama berjalannya program ini sudah dapat menjangkau 1.286.194 penerima manfaat yang telah tersebar di 44 kota di Indonesia.

Adapun alur pendistribusian dari Bantuan Pangan Non Tunai yaitu Kementerian Sosial Republik Indonesia bekerja sama dengan Bank yang telah ditunjuk dan distributor pangan seperti BULOG, BUM Des dan GAPOKTAN, di mana Bank yang akan mencatat seluruh transaksi yang akan digunakan oleh Keluarga Penerima Manfaat dan distributor pangan yang akan menyalurkan bahan pokok kepada e-warong yang sudah terdaftar atau bekerjasama dengan Bank serta Distributor bahan Pangan. Semua yang menerima manfaat dapat memakai bantuan yang telah diberikan melalui e-warong ataupun agen yang telah ditetapkan.

Pada awal peresmian program ini bantuan yang diberikan berupa uang dalam bentuk e-wallet sebesar Rp 110.000/KPM dan hanya bisa dipakai untuk menebus beras dan telur yang sudah tersedia di E-Warong ataupun Agen yang telah bekerja sama dengan Kementerian Sosial. Namun, di tahun 2020 ini, diakibatkan karena adanya pandemi virus corona. Kemensos RI mengubah nama Bantuan Pangan Non Tunai menjadi Program Pelaksanaan Sembako Kementerian Sosial dan masih berpacu pada kebijakan yang sama, namun bantuan ini dapat dipakai untuk menebus bahan pangan yang berupa beras, telur, kacang dan buah melalui e-warong ataupun agen, bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini sebesar Rp 200.000/KPM dan tidak dapat dicairkan atau diuangkan, yang dapat menjadi bagian dari e-warong adalah agen bank, pedagang ataupun pihak-pihak yang menjalin kerjasama dengan bank penyalur dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah langsung yang dapat berupa koperasi, toko kelontong, pasar tradisional, dan lain sebagainya. Pencairan bantuan hanya dapat dilakukan di e-Warong juga hanya dapat dilakukan menggunakan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera). Untuk tata cara melakukan transaksi di e-Warong sendiri pemerintah sudah mencantumkan di setiap e-Warong yang terdaftar, sehingga masyarakat dapat melihat langsung bagaimana cara melakukan transaksi di e-Warong. Setiap e-warong yang telah terdaftar akan diberikan tanda yang berupa stiker yang bergambarkan bahan pangan di setiap e-warong nya.

Keluarga penerima manfaat bantuan sosial pangan merupakan masyarakat yang keadaan ekonomi keluarganya rendah sebesar 25% didaerahnya, dan sumber data penerima bantuan sosial pangan ini diperoleh dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang merupakan hasil dari pembaharuan basis data terpadu pada tahun 2015. Program BPNT ini dibentuk guna mengurangi beban masyarakat yang memiliki keadaan ekonomi yang rendah untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam bidang pangan, memberikan gizi seimbang bagi masyarakat yang kurang mampu, meningkatkan ketepatan sasaran, memberikan pilihan dan kendali pada masyarakat kurang mampu (KPM) karena di program sebelumnya (Rastra) masyarakat tidak dapat memilih kualitas beras yang diinginkan karena sudah di beri subsidi oleh pemerintah sehingga banyak yang

mendapatkan beras dengan kualitas yang tidak diharapkan, serta untuk mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Adapun kebijakan yang menjadi pijakan dalam pelaksanaan program bantuan pangan non tunai ini yaitu Permensos RI Nomor 20 tahun 2019 sebagai perubahan dari Permensos RI Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

Pelaksanaan program BPNT di kota Batam sebenarnya sudah berjalan dengan baik, namun menurut Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kota Batam, masih sering ditemukannya penyaluran yang tidak tepat sasaran (Tribun Batam 2020). Masyarakat yang menerima bantuan pangan non tunai di Kota Batam sendiri per Agustus 2020 tercatat sebanyak 23.086 KPM, jumlah ini menurun jika dibandingkan dengan jumlah penerima di bulan Januari hingga Maret sebanyak 23.126 KPM hal ini dikarenakan banyak penerima bantuan (KPM) yang tidak memanfaatkan bantuan yang telah diberikan. Sebenarnya jumlah penerima bantuan di Kota Batam terdiri dari 30.000 KK namun yang menerima bantuan hanya 23.086 KK saja, hal ini dikarenakan Kementerian Sosial RI menggunakan data dari 10 Tahun yang lalu. Di Kota Batam sendiri memiliki 68 agen dan 33 e-warong yang menjadi media transaksi oleh penerima manfaat, jumlah ini tentunya belum merata di seluruh kecamatan ataupun kelurahan di Kota Batam seperti yang tertera dalam “Lampiran I” dalam skripsi ini.

Penyaluran bantuan pangan non tunai di Kota Batam berpedoman pada Permensos RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai namun pelaksanaannya belum berjalan secara optimal, dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mengerti sehingga banyak penerima bantuan tidak memanfaatkan bantuan tersebut. Tentunya banyak alasan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak memanfaatkan bantuan tersebut, seperti terjadinya pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai ketentuan pencairan Bantuan Pangan Non Tunai, kurangnya kerjasama antar pihak terkait, dan kualitas sarana dan prasarana yang diberikan. Dari masalah-masalah tersebutlah peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait **“Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Batam”**.

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan bantuan pangan non tunai yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam?
2. Bagaimana evaluasi pelaksanaan bantuan pangan non tunai yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam?
3. Apa saja faktor yang mempengaruhi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dalam pelaksanaan bantuan pangan non tunai?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan program bantuan pangan non tunai di Kota Batam.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana evaluasi pelaksanaan bantuan pangan non tunai di Kota Batam.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan pangan non tunai di Kota Batam.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin disampaikan melalui penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
   1) Untuk Mahasiswa Jurusan Administrasi Negara

      Penelitian ini memiliki manfaat menjadi sarana pembelajaran dan referensi jika ada pihak-pihak yang tertarik melakukan penelitian terkait Bantuan Pangan Non Tunai.
   2) Untuk Masyarakat

      Penelitian ini memiliki manfaat sebagai sarana informasi tentang pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Batam dan

faktor-faktor yang menghambat Dinas Sosial dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai.

3) Untuk Peneliti Selanjutnya

Sebagai rekomendasi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian terkait Bantuan Pangan Non Tunai.

2. Manfaat Praktis

1) Untuk Dinas Sosial Kota Batam

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai tinjauan literatur yang diharapkan dapat digunakan sebagai informasi untuk menemukan solusi dalam menyelesaikan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai.

2) Untuk E-Warong

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran untuk membangun e-warong kepada pelayanan yang lebih baik.

3) Secara Akademis, penelitian ini dapat memberikan pengertian yang dapat menjadi masukan bagi penelitian lain yang tertarik untuk mengkaji implementasi bantuan pangan non tunai di Kota Batam.

4) Secara praktis, penelitian ini mampu memberikan saran atau kritik kepada pemerintah Kota Batam dan pihak-pihak terkait dalam melaksanakan program bantuan pangan non tunai sehingga dapat terlaksana dengan baik serta mengatasi masalah kemiskinan di Kota Batam.

UPB

Universitas Putera Batam

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Dasar

2.1.1 Kebijakan Publik

Thomas R. Dye mengartikan jika kebijakan publik merupakan seluruh kegiatan yang dilakukan pemerintah dengan alasan sebuah peraturan harus dilaksanakan dan manfaat untuk kehidupan masyarakat harus menjadi tinjauan yang menyeluruh sehingga peraturan memiliki kegunaan yang besar untuk masyarakat dan tidak mengakibatkan kerugian dan disanalah pembuat kebijakan harus bijaksana dalam membentuk sebuah kebijakan. Sedangkan David Easton mengatakan jika kebijakan publik merupakan pemberian norma yang sah untuk semua masyarakat (Anggara, 2014, hal. 35).

a. Kriteria Penentuan Kebijakan Publik

Said Zainal Abidin, menyatakan jika kebijakan publik memiliki perhatian utama yang berbeda untuk di proses. Hal tersebut ditetapkan dari proses penyaringan dari bebrapa kriteria. Adapun kriteria tersebut antara lain: (Anggara, 2014, hal. 171):

1. Efektivitas, membuat alternatif peraturan dengan cara memperkirakan suatu alternatif tujuan yang akan diperoleh sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan;
2. Efisien, untuk mencapai sasaran yang ditentukan harus menggunakan biaya yang sesuai;
3. Cukup, mencapai tujuan sebuah kebijakan melalui sumber daya yang telah tersedia;
4. Tidak memihak atau tidak diskriminatif;

5. Terjawab, tujuan dengan adanya sebuah kebijakan adalah untuk menjawab apa yang masyarakat perlukan dalam suatu masalah.

b. Proses Pembuatan Kebijakan

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan hal yang menjadi perhatian utama dalam kebijakan publik. Proses tersebut menggambarkan kegiatan yang terus terjadi di setiap waktu. Semua proses saling berkesinambungan antara satu dengan yang lain, sehingga ketika ada kesalahan dalam salah satu prosesnya maka akan berkaitan dengan proses sebelumnya. Menurut William N. Dunn kegiatan yang terdapat ketika menerapkan prosedur tinjauan kebijakan yang sesuai pada tahap tertentu dari proses pembuatan kebijakan, seperti yang diuraikan dalam Bagan 2.1.1 yang merupakan beberapa cara penerapan analisis kebijakan yang menjadikan proses pembuatan dan kinerja berjalan lebih baik (Anggara 2014:172–173).

Bagan 2.1.1 Kedekatan Prosedur Analisis Kebijakan dengan Tipe-tipe Pembuatan Kebijakan

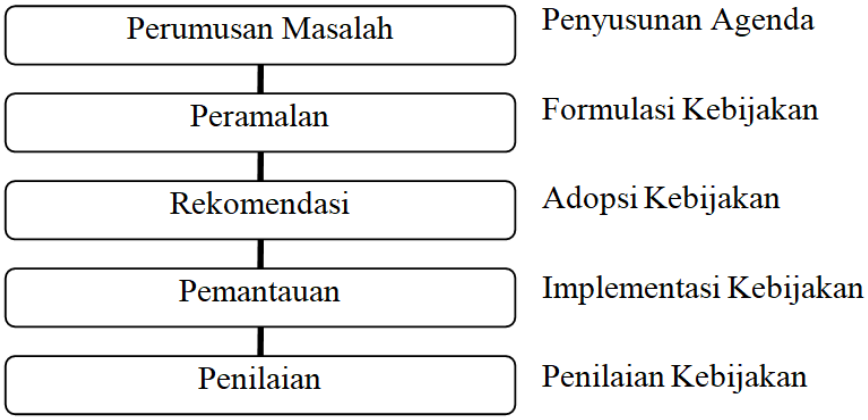

Sumber: Sahya Anggara (2014: 172)

1. Membantu untuk memperoleh masukan yang tidak terlihat atau terdengar, memperkirakan penyebabnya, menyusun tujuan yang menggabungkan pandangan yang berbeda dan menyusun kesempatan-kesempatan timbulnya kebijakan yang baru melalui perumusan kebijakan.

2. Peramalan dapat memberikan informasi yang sesuai dengan peraturan terkait masalah apa yang kemungkinan terjadi pada masa depan sebagai dampak dari diperolehnya cara lain, termasuk tidak melaksanakan kebijakan. Hal ini dilaksanakan diproses formulasi kebijakan.

3. Rekomendasi menghasilkan informasi yang sesuai dengan peraturan terkait tujuan atau dana dari bemacam alternatif ataupun cara, yang berdampak pada masa depan yang sudah di perkirakan melalui peramalan untuk membantu dalam pengambilan keputusan di tahap adopsi kebijakan.

4. Pemantauan memberikaninformasi tentang akibat yang diperoleh dari peraturan yang telah ditetapkan. Ini membantu pembuat kebijakan dalam proses implementasi kebijakan dengan memakai berbagai macam indikator sebagai pedoman ataupun acuan.

5. Penilaian memberikan pemahaman terkait perbedaan antara kinerja dengan peraturan yang diterapkan dan yang diciptakan. Selain menciptakan kesimpulan terkait masalah, evaluasi juga dapat menyumbang pada kelompok dan kritik kepada norma yang mendasari peraturan, membantu dalam penyesuaian serta perumusan masalah.

2.1.2 Pemerintahan Daerah

Menurut Harris pemerintahan daerah merupakan pemerintahan yang kegiatannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang telah dipilih secara demokrasi dengan mengakui supremasi pemerintahan nasional. Pemerintahan daerah diberika wewenang, diskersi, atau kebebasan dalam mengambil keputusan serta tanggung jawab tanpa di kontrol dengan wewenang yang berada diatasnya (Nurcholis et al., 2017, hal. 1.26).

Secara orisinal pelaksanaan pemerintahan daerah didasari oleh pertimbangan sebagai berikut ini (Nurcholis et al., 2017, hal. 1.37-1.40):

1) Sistem sosial, politik, dan berbeda disetiap daerah, maksudnya sebelum terbentuknya negara nasional setiap daerah sudah memiliki sistem sosial,

politik dan budaya yang telah tumbuh dan berkembang di kehidupan bermasyarakatnya. Sebagai contoh masyarakat Kepulauan Riau yang berbeda dengan masyarakat Sumatera Utara, begitupun antar daerah yang lain.

2) Sebagai cara untuk membuat masyarakat merasakan pelayanan yang diberika, artinya pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengendalikan dan menangani urusan masyarakat sesuai dengan kepentingan dan pendapatnya, karena jakan dilaksanakan dengan tatanan birokrasi yang panjang dan kompleks.

3) Menciptakan administrasi pemerintahan yang efisien, maksudnya jika proses administrasi pemerintahan hanya diurus oleh pemerintahan pusat maka akan menciptakan tatanan dan rantai kendali yang panjang. Tahap koordinasi akan berjalan lebih mudah dan penilaian akan lebih efektif jika memiliki rentang kendali yang tidak panjang karena pertanggungjawabannya terletak di daerah yang bersangkutan..

Sebelum di amandemen kebijakan yang mengatur terkait pemerintahan daerah adalah Bab VI Pasal 18 UUD 1945 tentang Pemerintahan Daerah. Inti dari pasal ini bahwa negara Indonesia terdapat Pemerintah Daerah yang terbagi menjadi daerah besar dan daerah kecil perlu melihat (Nurcholis et al., 2017, hal. 2.1):

a) Dasar permusyawaratan, artinya demokrasi haru menjadi pedoman bagi pemerintahan daerah karena memiliki ciri utama berupa adanya permusyawaratan dalam dewan perwakilan rakyat;

b) Keistimewaan asal-usul dalam derah, artinya daerah-daerah yang berada di masa Belanda adalah daerah swapraja atau lebih dikenal dengan sebutan *zelfbesturende lanschappen* dan kesatuan masyarakat hukum pribumi, tidak dapat dihapuskan oleh pemerintah daerah seperti Marga yang disebut *volksgemenschappen* atau *zelfstandigemenschappen*.

2.1.3 Koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan

Kewajiban Pemerintah Daerah adalah sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah selaku lembaga eksekutif daerah. Dalam melaksanakan kebijakan atau peraturan daerah perlu adanya koordinasi antardinas dan pelaksana teknis yang baik. Suatu arah tindakan yang akan dilaksanakan menjadi lebih jelas jika memiliki koordinasi didalamnya, karena koordinasi dapat membentuk keselarasan dalam tindakan dan cara yang akan digunakan serta membuat pembagian tugas antar dinas dan lembaga teknis menjadi lebih jelas. Dalam pemerintah daerah, kepala daerah merupakan pihak yang berperan sebagai koordinator utama dalam melaksanakan koordinasi, sedangkan sekretaris daerah yang akan menjalankan secara operasional (Nurcholis et al., 2017, hal. 7.13-7.14). Agar koordinasi dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan:

a. Adanya keterkaitan anatar kebijakan dasar dengan keputusan pelaksanaannya;

b. Bersikap adil kepada semua pihak yang terlibat didalamnya;

c. Adanya sikap yang konsisten antara semua pihak dalam melaksanakantanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan dan tugasnya masing-masing;

d. Adanya perilaku semua aktor kebijakan yang taat terhadap ketentuan dan jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya;

e. Kebijakan ataupun peraturan serta pelaksanaannya harus jelas.

2.1.4 Implementasi Kebijakan Publik

Grindle menyatakan jika implementasi kebijakan sebenarnya bukan hanya tentang saling terhubungnya aturan penjelasan dari keputusan-keputusan politik kedalam tatanan cara yang rutin dilakukan menggunakan saluran birokrasi, tetapi jauh lebih luas dibandingkan itu, implementasi kebijakan berbicara tentang masalah konflik, dan memutuskan suatu kebijakan yang dilaksanakan akan berdapak pada siap (Anggara, 2012, hal. 12). Sedangkan menurut Chief J. O.

Udoji seorang pakar kebijakan asal Afrika mengatakanbahwa dibandingkan dengan pembuatan kebijakan, maka pelaksanaan dari suatu kebijakan merupakan hal yang lebih penting sebab suatu kebijakan hanya akan menjadi sebuah angan semata jika tanpa adanya pelaksanaan (Wahab, 2017, hal. 126).

a. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Terdapat tiga faktor yang dapat berpengaruh dalam keberhasialan pelaksanaan kebijakan seperti yang dikemukan oleh Mazmanian dan Sabatier (Anggara, 2014, hal. 257) diantaranya adalah: 1) karakteristik dari masalah, 2) karakteristik kebijakan/undang-undang, 3) lingkungan.

Bagan 2.1.2 Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sabatier

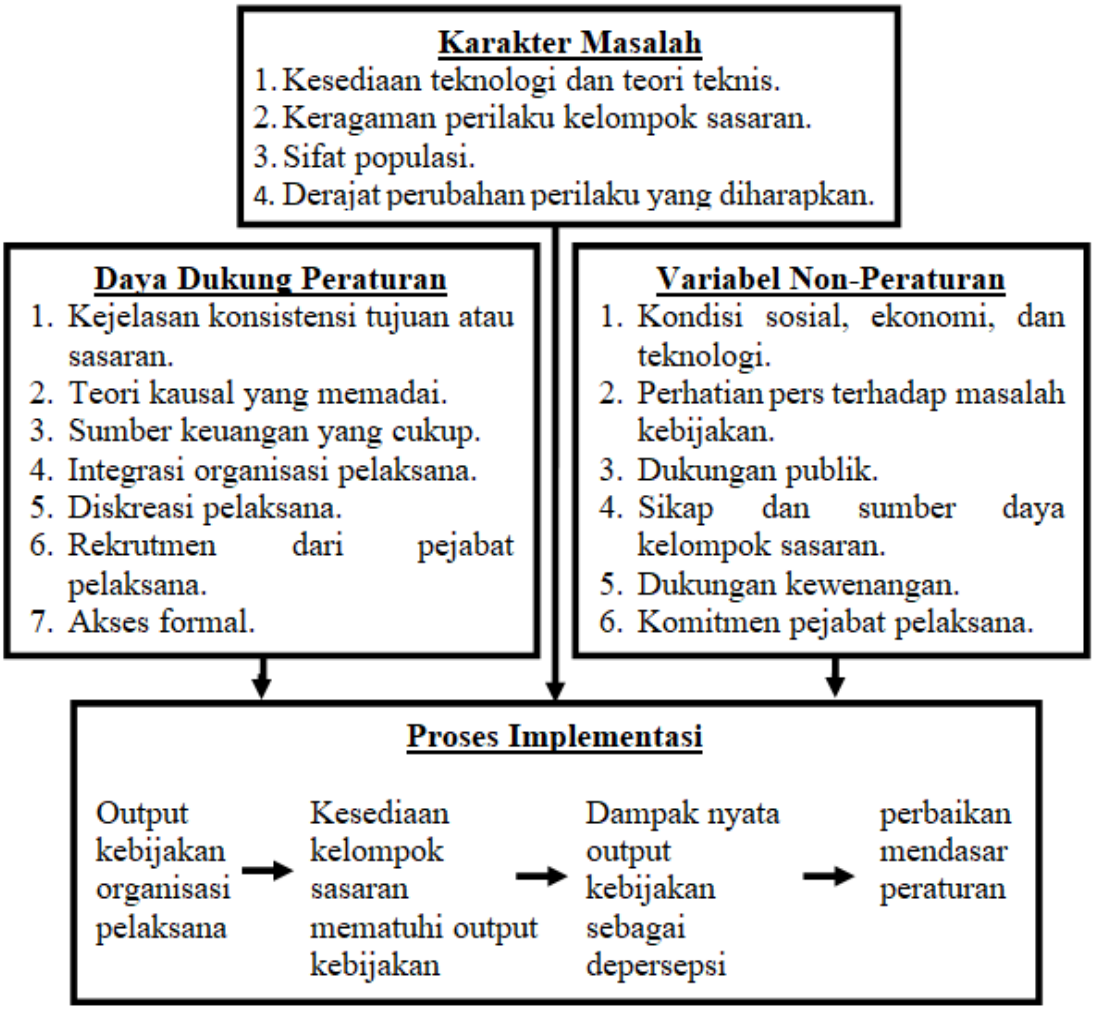

Sumber: Sahya Anggara (2014: 258)

b. Faktor yang Membuat Implementasi Kebijakan Gagal

Walaupun suatu kebijakan telah dibuat dengan sangat baik, namun hal ini tidak dapat meluputkan proses pelaksanaannya berjalan tanpa adanya kegagalan. Maka dari itu berikut ini faktor kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan yang disebabkan (Nurcholis et al., 2017, hal. 7.15-7.16):

1. Kebijakan yang dibuat penjelasannya tidak rinci. Yang berati jika pembuatan peraturan tidak dijelaskan secara detail sehingga pelaksana peraturan tidak mengerti dan menyimpulkan pemikirannya sendiri;
2. Lembaga atau pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan kebijakan publik tidak tepat;
3. Adanya tujuan yang tidak searah;
4. Upah tambahan yang tidak menarik, artinya pelaksana peraturan beranggapan jika upah tambahan guna pelaksanaan peraturan tidak sesuai dengan usahanya;
5. Keterbatasan kemampuan;
6. Sumber daya administrasi yang terbatas; dan
7. Kegagalan dalam menjalin komunikasi.

2.1.5 Penilaian Kinerja Program

Umumnya, dalam menilai kinerja dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama seperti yang telah dikemukakan oleh Martin dan Kettner (1996), yaitu: (1) pendekatan perilaku, pendekatan yang bersifat quality of task oriented behavior, dimana pendekatan ini memberikan pemahaman terkait perilaku yang relevan ataupun berhubungan langsung dalam pelaksanaan tanggungjawab seseorang. Hal utama yang sering dipakai ketika menilai dengan cara tersebut adalah sumber daya yang berupa uang, waktu, tenaga serta energi yang dikeluarkan, ketika proses dibandingkan dengan hasil yang telah diperoleh atau juga disebut dengan kriteria efisiensi; (2) pendekatan hasil, pendekatan ini bersifat *result oriented criteria*, pendekatan ini memberikan pelajaran mengenai kesesuaian antara hasil dan kualitas yang diinginkan oleh mereka yang membutuhkan dan sudahkah penyaluran dilakukan secara merata kepada yang membutuhkan dan hasil yang

sesuai dengan tujuan atau rencana awal inilah yang dikenal dengan efektifitas (Keban 2019:259–264).

2.1.6 Evaluasi Kebijakan

(Nurcholis et al., 2017, hal. 7.21-7.23) dalam tahapan pembuatan kebiajakan, evaluasi kebijakan adalah tahap yang terakhir dilakukan dan merupakan penilaian secara menyeluruh dari input, proses, outputs, hingga outcomes dari peraturan pemerintah pusat maupun daerah. Dari tahap evaluasi inilah dapat menarik kesimpulan sudahkah kebijakan yang telah ditetapkan berjalan sesuai dengan rencana awal. Dan dari tahap evaluasi pulalah dapat diketahui tingkat keberhasilan yang dicapai sudah sejauh mana dan jika gagal maka dapat mengidentifikasi mengapa kebijakan tersebut bisa gagal. Evaluasi juga dapat digunakan untuk mengetahui kinerja dan tanggungjawab para pelaksana kebijakan sudah sampai sejauh mana. Selain itu, tahap penilaian ini juga dipakai sebagai tolak ukur bagi para pembuat peraturan guna penyempurnaan lebih lanjut.

A. Tipe-tipe Evaluasi

Terdapat empat tipe evaluasi yang dikemukakan oleh Finance, diantaranya adalah:

a. Evaluasi kecocokan (appropriateness), yaitu melaksanakan evaluasi apakah suatu kebijakan tetap bisa dipertahankan atau kebijakan tersebut perlu diganti dengan kebijakan yang baru;

b. Evaluasi efektivitas, yaitu melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan tentang apakah kebijakan tersebut sudah menghasilkan hasil atau dampak sesuai dengan tujuan kebijakan;

c. Evaluasi efisiensi, yaitu melaksanakan penilaian dengan pedoman ekonomis, yaitu sejauh mana manfaat yang diterima dibandingkan dengan sumber daya yang telah dikeluarkan;

d. Evaluasi meta, yaitu melaksanakan penilaian terhadap tahapan penilaian itu sendiri.

Disiplin dan tahapan waktu adalah pedoman dasar dalam tahapan evaluasi. Makanya kita perlu (1) membuat aturan umum untuk melakukan penilaian, dan (2) membuat pengaturan fasilitas yang terdiri dari parameter dan indikator. Aturan umum terdiri dari empat aspek yang terdiri dari:

1. Input, merupakan bentuk saran yang diberikan kepada pelaksana kebijakan;
2. Proses, yaitu cara mentransformasikan suatu peraturan kedalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat;
3. Outputs (hasil), merupakan hasil dari pelaksanaan kebijakan yang telah dilakukan;
4. Outcomes (dampak), merupakan dampak yang dihasilkan kepada target sasaran apakah sesuai dengan rencana kebijakan.

Sedangkan seperangkat instrumen yang mencakup parameter dan indikatornya adalah sebagai berikut:

1. Input, indikator-indikatornya terdiri dari:
   a. Sumber daya pendukung seperti Sumber Daya Manusia, biaya, sarana ataupun prasarana);
   b. Bahan pendukung lainnya yang berupa peralatan dan teknologi.
2. Proses, indikator-indikatornya terdiri dari:
   a. Apakah kebijakan telah dilaksanakan secara tepat sasaran atau tidak;
   b. Tepat guna ataupun tidak;
   c. Efisien atau tidakkah kebijakan tersebut;
3. Outputs (hasil), indikator-indikatornya terdiri dari:

a. Ketepatan sasaran;

b. Besar sasaran yang diakomodir;

c. Banyaknya target yang ditangani;

d. Jumlah kelompok sasaran yang terlibat;

4. Outcomes (dampak), indikator-indikatornya terdiri dari:

a. Ada atau tidaknya perubahan pada target kebijakan;

b. Seberapa besar perubahan target yang telah menerima;

c. Seberapa jauh perubahan yang terjadi pada target kebijakan dibandingkan dengan tujuan yang hendak diraih.

B. Indikator Evaluasi Kebijakan

Tabel 2.1.1 Indikator Evaluasi Kebijakan

No.	Indikator	Fokus Penilaian
1	Input	a. Apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan memadai? b. Berapakah SDM, uang, dan infrastruktur pendkung lain yang diperlukan?
2	Proses	a. Bagaimanakah sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat? b. Bagaimanakah efektivitas dan efisiensi metode yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut?
3	Outputs	a. Apakah hasil atau produk yang dihasilkan dari sebuah kebijakan publik? b. Berapa orang yang berhasil mengikuti program/kebijakan tersebut?
4	Outcomes	a. Apakah dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan tersebut? b. Berapa banyak dampak positif yang dihasilkan? c. Adakah dampak negatifnya? Seberapa jauh dampak negatif tersebut?

Sumber: Hanif Nurcholis, Enceng, Zainul Ittihad Amin (2017:7.24)

Dengan menggunakan indikator yang dikemukan oleh Badjuri dan Yuwono diatas maka tahap evaluasi akan menunjukkan apakah suatu kebijakan memiliki banyak dampak positif ataupun sebaliknya, dan dari situ para pembuat ataupun pelaksana kebijakan dapat mengambil keputusan apakah suatu kebijakan dapat dilanjutkan atau harus diganti dengan kebijakan yang baru.

2.1.7 Bantuan Pangan Non Tunai

Bantuan Pangan Non Tunai resmi dilaksanakan tahun 2017 dan sebagai bentuk perubahan dari beras sejahtera dan telah tersebar di berbagai daerah dalam

bentuk bantuan secara non tunai dan dilakukan menggunakan e-wallet. BPNT adalah bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk non tunai dari pemerintah dan diberikan kepada KPM atau penerima bantuan guna membeli bahan pangan yang telah tersedia di e-warong ataupun agen dengan sarana kartu keluarga sejahtera (Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, 2019).

Adapun tujuan dari penyelenggaraan program ini adalah: (1) mengurangi masalah pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai dengan cara pemenuhan sebagian kebutuhan pangan; (2) memberikan bahan pangan dengan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM; (3) memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi; dan (4) memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Selain itu, adapun manfaat dari penyelenggaraan program ini yaitu: (1) meningkatkan ketahanan pangan di tingkat Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai sekaligus sebagai tata cara perlindungan sosial dan menangani kemiskinan; (2) meningkatnya transaksi non tunai; (3) meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan; (4) meningkatnya efisiensi penyaluran Bantuan Sosial; dan (5) meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan. Sedangkan untuk dapat memperoleh bantuan ini masyarakat harus berada di lokasi dengan kriteria seperti: (1) tersambung dengan jaringan internet; dan (2) terdapat e-warong.

2.2. Penelitian Terdahulu

Adapun para peneliti yang memiliki minat untuk meneliti tentang Bantuan Pangan Non Tunai ini, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ishak Fadlurrohim, Soni Akhmad Nulhaqim dan Sri Sulastri dengan judul Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Studi Kasus Di Kota Cimahi) volume 9 nomor 2, tahun 2019 (122-129). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif guna menghasilkan data

deskriptif. Sebagai hasilnya, pelaksanaan program bantuan pangan non tunai dilaksanakan berdasarkan sasaran, waktu, kualitas, kuantitas seperti dalam peraturan dan tertib pengelolaan. (Fadlurrohim et al., 2019).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Risnandar dan Aditya Wisnu Broto, berjudul Implementasi Program Bantuan Sosial Non Tunai Di Indonesia Volume 7, Nomor 03, Mei - Agustus, Tahun 2018 (189-204) ISSN: 2089-0338. Penelitian ini memakai metode kuantitatif. Hasilnya menjabarkan jika tingkat kepuasan KPM sudah terbilang tinggi terhadap fungsi e-warong meskipun masyarakat belum sepenuhnya terlibat dalam pengambilan keputusan KPM, penyediaan pangan yang belum optimal, dan kesejahteraan sosial dalam penyaluran program BPNT (Risnandar & Broto, 2018).

3. Penelitian yang dilakukan Benny Rachman, Adang Agustian dan Wahyudi, yang berjudul Efektivitas Dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) Dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Volume 16 Nomor 1, Juni 2018 (1-18). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar penerima bantuan pangan (KPM) berasal dari kelompok usia produktif yang merupakan lulusan sekolah dasar ataupun sekolah menengah pertama, dan jika berdasarkan kelompok pekerjaan, KPM yang menerima adalah buruh ataupun yang berasal dari non pertanian dengan rata-rata penghasilan Rp1,6 Juta/KPM dan memiliki jumlah keluarga 5/KK (Rachman et al., 2018).

4. Penelitian yang dilakukan M. Hidayat Panuntun Muslim, yang berjudul Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Kuranji Kota Padang, volume 2 nomor 1, maret 2019. Penelitian dilakukan memakai metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasilnya menjelaskan jika ditemukan faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan BPNT yaitu faktor internal berupa jumlah dan kualitas pejabat publik yang kurang memadai, dan faktor eksternal berupa kurangnya pengetahuan masyarakat tentang program BPNT sehingga banyak anggota KPM yang

mendapatkan bantuan tetapi tidak tahu bagaimana menerima atau menggunakannya (Muslim, 2018).

5. Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Rachman Hidayat, yang berjudul Distribusi Beras Bulog Pasca Bansos Rastra Dan Bantuan Pangan Non Tunai, volume 2 nomor 2, oktober 2018, P- ISSN 2579-8952. Penelitian ini menggunakan analisis data gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan jika program BPNT menghasilkan penyaluran bantuan pangan jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan program beras sejahtera (Hidayat, 2018).

6. Penelitian yang dilakukan oleh Erni Ermawati, yang berjudul Algoritma Klasifikasi C4.5 Berbasis Particle Swarm Optimization Untuk Prediksi Penerima Bantuan Pangan Non Tunai Volume 8, Nomor 3, September 2019 (513 –528). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan jika metode algoritma C4.5 dengan particle swarm optimization (PSO) memberikan hasil yang lebih akurat dalam memprediksi penerima BPNT dibandingkan dengan metode algoritma C4.5 (Ermawati, 2019).

7. Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Benny Alexandri dengan judul Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Cakung Jakarta Timur Tahun 2019, Jurnal Moderat, Volume 6, Nomor 2 tahun 2019 dengan ISSN: 2622-691X. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dan metode yang digunakan untuk penulisan ini adalah Studi pustaka dan observasi lapangan. Hasil dari penelitian Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cakung Jakarta Timur ini dinilai sudah berjalan secara baik dan efektif sebagai salah satu upaya pemerintah untuk pengentasan kemiskinan, namun masih banyak yang harus diperbaiki dari segi mekanisme pelaksanaan agar berjalan lebih efektif lagi (Alexandri, 2019).

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menurut Uma Sekarah didalam bukunya Bussiness Research (1992) adalah model konseptual mengenai teori saling terkait dengan berbagai faktor yang telah diperkirakan sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Kerangka pemikiran dalam suatu penelitian perlu disampaikan jika dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel ataupun lebih (Sugiyono, 2015, hal. 60). Dimana peneliti menjadi peraturan terkait bantuan pangan non tunai menjadi pedoman pelaksanaan program ini, dan dari pedoman tersebutlah peneliti tertari menentukan kriteria-kriteria yang harus diteliti dengan melibatkan subjek-subjek yang terlibat dalam pelaksanaan dengan menggunakan teori indikator implementasi kebijakan, indikator evaluasi kebijakan serta teori faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Dan dari teori serta observasi langsung ke subjek terkait maka peneliti akan melakukan analisis guna mengetahui serta mampu menjelaskan terkait evaluasi pelaksanaan bantuan pangan non tunai di Kota Batam. Adapun kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini guna menjelaskan hubungan antar variabel:

Gambar 2.3.1 Kerangka Pemikiran

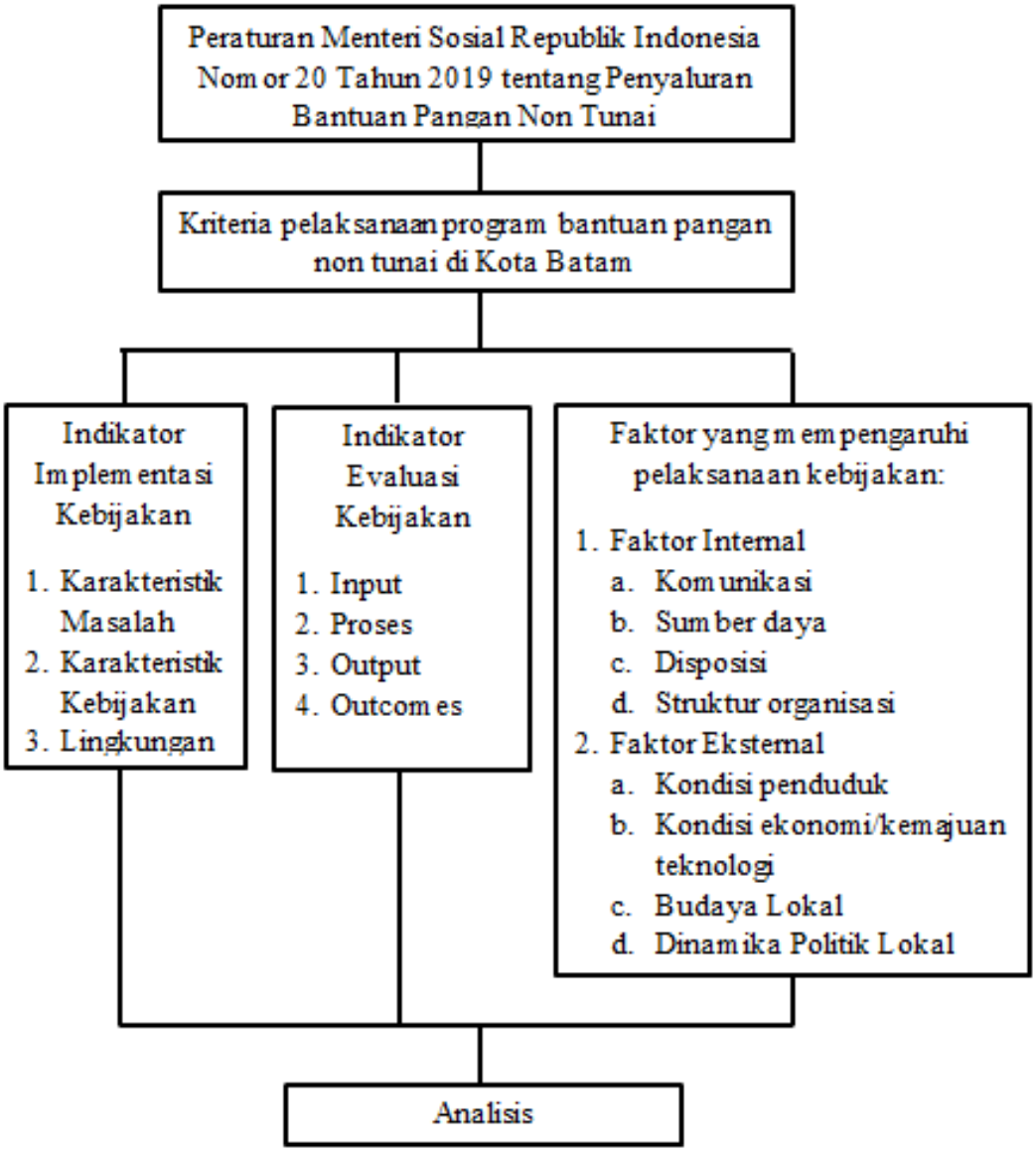

UPB

Universitas Putera Batam

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Untuk mendapatkan data yang relevan dan valid dalam melakukan sebuah penelitian maka harus melalui tahap-tahap untuk mencapai tujuan. Sehingga akan diperoleh informasi dari informan yang akurat dan lengkap sesuai dengan tujuan penelitian. Maka dari itu, metode penelitian merupakan dasar tumpuan bagi penulis untuk melakukan penelitian. Jenis penelitian yang sesuai dengan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teori ini dikembangkan dari penelitian dan di kontrol atas dasar empirik dengan metode untuk mendapatkan kebenaran yang tergolong dalam penelitian ilmiah merupakan penelitian kualitatif.

3.2. Fokus Penelitian

Dalam sebuah penelitian perlu adanya batasan masalah yang menjadi fokus penelitian dan ini bersifat penting, karena dengan adanya batasan masalah maka penelitian yang dilakukan memiliki fokus yang berisikan pokok masalah. Dalam penelitian ini penulis memberikan batasan penelitian dengan memfokuskan tentang Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Batam yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan perpanjangan tangan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, serta faktor-faktor yang menghambat Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dalam pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Batam.

3.3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis di dukung oleh dua jenis data yang bersumber dari data primer dan juga data sekunder.

1. Data Primer adalah berbagai informasi yang diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang dijadikan narasumber dalam penelitian. Adapun

narasumber dalam penelitian penelitian ini dapat di lihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.3.1 Nama Narasumber Penelitian

No.	Nama Narasumber	Jabatan
1	Fitri	Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Kota batam
2	Yusuf	Anggota Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Kota Batam
3	Kertini	Pengelola Agen Giyanto Sekupang
4	Elizar	Pengelola E-Warong Intan Tanjung Riau Sekupang
5	Setiawati	Pengelola E-Warong Kartini Mandiri Bengkong
6	Ayu	Pengelola E-Warong Bengkong
7	Mireanti	Pengelola E-Warong Melati Nongsa
8	Rossi	Pengelola E-Warong Rossi Nongsa
9	Ellias	TKSK Kecamatan Bengkong
10	Supriadi	TKSK Kecamatan Bengkong
11	Hanita	Penerima BPNT Kecamatan Bengkong

Sumber : Hasil Penelitian tahun 2020

Teknik yang dipakai untuk penulis mengumpulkan informasi dengan kriteria tertentu dengan *purposive sampling*. Kriteria yang penulis tetapkan dalam pemilihan narasumber adalah:

a. Dewasa

b. Konsisten

c. Pengelola E-Warong atau Agen dengan jumlah penerima terbanyak per-kecamatan

d. Terlibat dalam proses penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Batam

2. Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari buku, literatur, berita resmi Badan Pusat Statistik Nasional dan Kepulauan Riau didukung oleh data yang diterbitkan oleh Kementerian terkait, jurnal penelitian terdahulu yang diperoleh dari SINTA, DOAJ, serta Google Scholar dan sumber-sumber pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah:

1. Observasi merupakan berkenaan dengan kejadian yang terlihat serta diamati secara sistematis. Observasi dapat dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap tanda-tanda yang hendak diteliti secara sistematis, dan di kontrol secara berkala realitas dan validitasnya. Sehingga observasi merupakan aktivitas yang kompleks.

2. Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan aktivitas tanya jawab secara langsung maupun tidak langsung dengan narasumber. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, Pengelola E-Warong dan Agen Kota Batam dan Masyarakat yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Batam.

3. Dokumentasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan bisa berbentuk tulisan seperti sejarah, berita, laporan, peraturan, dan kebijakan. Agar penelitian ini lebih akurat dapat menggunakan dokumen berbentuk gambar seperti foto.

3.5. Metode Analisis Data

Gambar 3.4.1 Komponen dalam analisis data

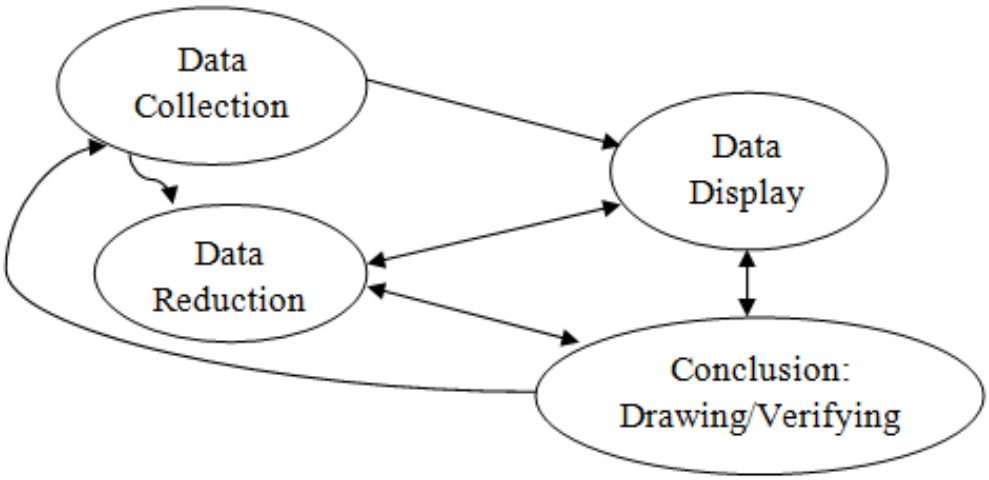

Sumber: Sugiyono, 2015:246

Miles dan Huberman (Sugiyono, 2015: 246-253), menyatakan jika kegiatan di kajian data kualitatif dilaksanakan dengan aktif serta berjalan secara berkelanjutan sampai datanya terkumpul. Kegiatan mengkaji data ini diantaranya:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data): merupakan aktivitas untuk menyimpulkan, memilih hal-hal pokok dengan memfokuskan pada hal-hal penting dan dicari tema hingga polanya. Dengan demikian data yang telah disimpulkan akan memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya;

2. *Data Display* (Penyajian Data): penguraian data di penelitian secara kualitatif bisa berbentuk grafik, pivtogram, tabel, ataupun dengan bentuk sejenisnya, penyajian data ini bertujuan untuk membuat data yang lebih terorganisasikan, tersusun sehingga semakin mudah untuk dipahami.

3. *Conclusion Drawing/Verification*: rangkuman ataupun hasil akhir dari penelitin yang dilakukan dengan cara kualitatif adalah hasil baru dan tidak pernah ada sebelumnya. Temuan ini dapat berbentuk deskriptif ataupun

gambaran suatu target yang masih kurang jelas sebelumnya dan akan menjadi jelas setelah diamati.

3.6. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji keabsahan data guna memastikan tingkat kebenaran dan kepercayaan yang terdiri dari:

1. *Uji Kredibilitas*, kepercayaan terhadap data hasil penelitian antara lain dilakukan dengan:

   a. Perpanjangan pengamatan merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan penulis kembali ke objek penelitian. Dalam hal ini penulis kembali ke Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, Pengelola E-Warong ataupun Agen termasuk Masyarakat penerima bantuan untuk menggali informasi lebih dalam lagi sehingga informasinya dapat diperoleh secara lengkap.

   b. Meningkatkan ketekunan merupakan sebuah aktivitas guna melaksanakan pemeriksaan dengan lebih teliti dan saling berhubungan. Sehingga adanya urutan semua kejadian yang dicacat secara sistematis serta pasti.

   c. Triangulasi berarti memakai berbagai macam bentuk pengukuran guna memeriksa kejadian yang serupa.

   d. Peneliti menggali data dari berbagai sumber yang berbeda dari apa yang diperoleh ketika penelitian guna menganalisis kasus yang bersifat negatif. Data dapat dipercaya jika ditemukan data yang berlawanan dari temuan sebelumnya.

   e. Memakai sebuah pijakan ataupun referensi sangatlah penting untuk mendukung analisis data lebih akurat, misalnya dalam laporan penelitian dilengkapi dengan dokumentasi dari hasil penelitian, tabel atau grafik yang autentik sehingga lebih akurat laporan penelitiannya.

f. Mengadakan *membercheck* merupakan tahap memeriksa data yang ditemukan peneliti kepada yang memberi data dan bermaksud untuk melihat sejauh mana kesesuaian data yang telah diberikan.

2. *Uji Komfirmability*, hasil dari penelitian sudah disetujui oleh semua pihak.

3. *Uji Depenability*, melakukan pemeriksaan pada semua proses penelitian.

4. *Uji Transferability*, laporan penelitian harus dibuat dengan syarat mampu dipercaya, jelas serta sistematis.

3.7. Lokasi dan Jadwal Penelitian

a. Lokasi

Adapun penelitian ini berlokasikan di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, E-Warong Intan di Tanjung Riau Kecamatan Sekupang, Agen Giyanto Kecamatan Sekupang, E-warong Kartini Mandiri Kecamatan Bengkong, E-Warong ibu Ayu Kecamatan Bengkong, E-Warong Melati Kecamatan Nongsa dan E-Warong Rosi Kecamatan Nongsa. Lokasi ini dipilih karena telah mencakup semua aspek yang penulis butuhkan dalam penelitian ini.

b. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																															
		Desember 2021				Januari 2021				Februari 2021				Maret 2021				April 2021				Mei 2021				Juni 2021				Juli 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Studi Pustaka																																
2	Penyusunan Proposal																																
3	Pengumpulan Data																																
4	Pengolahan Data																																
5	Analisis Hasil Penelitian																																
6	Penyusunan Laporan																																
7	Penyerahan Laporan																																
8	Sidang Hasil																																

UPB

Universitas Putera Batam